

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS
COMMUNITY BASED MANAGEMENT**
(Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep)

Ida Syafriyani
Ida.fisipunija@gmail.com

ABSTRACT

Coastal area is a rich resource Coastal, marine and fisheries. Coastal areas also have potential that can be developed as a marine tourism area. People who live in the coastal area, since the first also has to depend its life from the utilization of natural resources found in coastal areas.. CBM (Community Based Management) is one approach that will be used in optimizing community empowerment in coastal areas with the CBM approach, not only the economic growth of coastal communities will improve, but also ensure economic growth that can be enjoyed fairly and proportionally. Departement of Fishery Sumenep Regency in coastal community empowerment Community-based refers to the development of entrepreneurs in order to improve the quality of products in production and develop the economy through empowerment that is based on the management of coastal communities industry,

Keywords: Empowered, Coastal and coastal Communities, CBM-Based

ABSTRAK

Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumberdaya alam, seperti tambak garam yang ada di wilayah pesisir Kalianget. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di sekitar pesisir pantai.. CBM (*Community Based Management*) merupakan salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai. Diharapkan dengan pendekatan CBM, tidak hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir pantai saja yang akan membaik, tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis masyarakat mengacu pada pengembangan para wirausahawan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta mengembangkan ekonomi melalui pemberdayaan yang di dasarkan pada pengelolaan industri masyarakat pesisir.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir Pantai, Berbasis *Community Based Management*

PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat pesisir sangat tergantung pada hasil sumber daya alam laut sebagai sumber penghasil utama penghidupan masyarakat pesisir bahkan dapat dikatakan bertumpu pada kekuatan alam sebagai penyangga kehidupannya. Perekonomian masyarakat pesisir salah satunya adalah sektor tambak garam. Tingginya unsur ketidakpastian dalam pembuatan garam sangat bergantung kepada cuaca dan musim, khususnya bagi masyarakat tambak garam, bahkan telah menjadi persepsi masyarakat secara umum yang berkembang menyangkut kebutuhan hidup keluarga masyarakat tambak garam dan umumnya masyarakat pesisir.

Sejarah kemiskinan keluarga yang mengantungkan hidup dari apa yang diberikan laut kemudian sering menjadi gambaran tekanan situasi sektor ini. Sektor industri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena industri dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau

memanfaatkan sumber daya alam berupa air laut yang di olah menjadi garam yang dapat di konsumsi menjadi kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

Pemberdayaan masyarakat yang berbasis *Community Based management* menurut Nikijulw (2004) sudah ada sejak Tahun 1994 dan baru dikembangkan pada Tahun 2015 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan merupakan salah satu program inovatif dari dinas perindustrian dan perdagangan yang di rincikan oleh seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dengan asumsi bahwa kebijakan yang dibuat tidak selalu bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat objek tetapi lebih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Community Based Management merupakan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat yang dirincikan dalam suatu kegiatan kelompok, dan bentuk dari partisipasi masyarakat. “Pengelolaan Berbasis Masyarakat” adalah sebagai pelaku utama dan berperan aktif serta dapat berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dalam suatu perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat intinya kemampuan menghasilkan “Partnership” antara pemerintah dan masyarakat. PBM ini dimulai oleh masyarakat itu sendiri, dan

dibantu oleh stakeholder dan didampingi oleh dinas terkait yakni dinas perikanan

Kabupaten Sumenep di klaim sebagai daerah penghasil garam terbesar di wilayah madura. sebagai daerah otonomi diharapkan memiliki perencanaan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan mempunyai struktur Industri dan Perdagangan yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Hingga akhir oktober 2017, khusus kecamatan kaliangget tercatat menghasilkan garam sebanyak 53.675,96 ton (koran madura.com, 30, Oktober 2017) Dalam semusim, ini artinya bahwa masyarakat sudah mampu melakukan pengolahan garam secara optimal dengan memanfaatkan air laut sebagai media. Target hasil panen garam yang di harapkan di tahun 2017 yaitu sebesar 125 ton, sedangkan berdasarkan rincian perolehan hasil garam tahun 2017 dari 8 kecamatan lainnya sebanyak 149.640,18 ton, sehingga melalui pemberdayaan masyarakat ini sangat tepat karena sudah mampu menghasilkan panen garam di atas ketentuan yang telah di targetkan.

Melihat kenyataan yang terjadi dalam Pernyataan mengenai kondisi masyarakat pesisir mendorong peneliti menulis penelitian dengan mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis Masyarakat”**, karena menurut peneliti masyarakat pesisir mempunyai hak penuh untuk mendapatkan kebijakan yang sebenar-benarnya dari pemerintah, setidaknya mereka bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin meluas dan bisa memperbaiki kondisi perekonomian yang tidak stabil.

TINJAUAN PUSTAKA

Potensi dan kearifan lokal merupakan beberapa bagian dari capital yang dimiliki oleh masyarakat. Program pemberdayaan tidak akan berhasil jika tidak berdasar pada nilai-nilai lokal yang telah mengakar di masyarakat.

Francis Fukuyama (dalam Jousairi Hasbullah. 2006:8) Kearifan lokal adalah merupakan modal sosial yang ada di masyarakat. Inti dari konsep modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan agar dapat mencapai tujuan bersama.

Dari teori tentang modal sosial diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat

untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam upaya proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat tambak garam serta memajukan desa-desa di pinggir pantai.

.Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat Usman (2008). Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Pemberdayaan dan Pembangunan Kapasitas
- b) Kemudahan Akses Modal dan Pemasaran

- c) Peningkatan Kreativitas, dengan meningkatkan bentuk pengelolaan yang inovatif
- d) Pendampingan Secara Kelompok
- e) Akuntabilitas dan Transparansi
- f) Pengembangan Mata Pencaharian
- g) Keadilan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan, memaparkan dan menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis masyarakat.

Sumber data berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan fokus pada prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat diantaranya peningkatan kreativitas, kemudahan akses modal dan pemasaran, pendampingan secara berkelompok.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat tambak garam yang berbasis *Community Based Management* mengacu pada tiga fokus yakni: *pertama*, Peningkatan Kreativitas. Peningkatan Kreativitas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, tahap peningkatan kreativitas merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan tahap peningkatan kreativitas terhadap para petani tambak melalui pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas garam hasil panen agar dapat lebih baik serta hasil produksi garam secara kuantitas jumlahnya akan meningkat.

Dengan jumlah produksi yang meningkat maka di harapkan dapat merubah keadaan serta kondisi perekonomian masyarakat tambak garam agar mampu bangkit dari keterpurukan secara ekonomi.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat petani tambak garam selain mampu memproduksi dengan

hasil yang berlimpah juga dapat menghasilkan garam dengan ukuran yang berkelas – kelas sehingga pada penentuan harga akhir dapat mencapai keuntungan yang optimal, pernyataan ini terbukti ketika harga garam pada tahun 2017 sempat meroket sampai di kisaran harga Rp.3.500 per kilogram (media madura, 21 Juli 2017).

Dengan adanya harga garam yang meningkat hampir 200 persen maka banyak pula bermunculan pengusaha baru dari masyarakat yang awalnya hanya menjadi petani biasa, namun karena imbas harga garam meningkat maka status sosial di masyarakat juga meningkat. Ini berarti bahwa petani dapat membangun wirausaha yaitu: menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain sebagai pribadi unggul yang patut di contoh dan di teladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. menghormati hukum dan peraturan yang berlaku berusaha memperjuangkan lingkungan, dan membangun wirausaha sama halnya dengan mengajarkan hidup efisien.

Peningkatan Kreativitas juga bertujuan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tambak garam akan kondisi perekonomian mereka dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki

kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Kedua, Kemudahan Akses Modal dan Pemasaran Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan tahap kemudahan akses modal dan pemasaran yang ditujukan langsung pada pengusaha dan masyarakat yang ada di kawasan tambak garam, melalui adanya bantuan modal yang di berikan dalam bentuk kelompok, atau di bentuk koperasi yang keanggotaannya terdiri dari para petani garam yang mengerjakan tambak – tambak garam pada saat musim kemarau.

Meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kemampuan para masyarakat terlatih melalui permodalan atau bantuan peralatan pengelolaan pembuatan garam dan bentuk peralatan berupa tarpal sebagai alas dalam pembuatan garam yang sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Dalam hal ini Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi para petani tambak garam dalam pengolahan air laut menjadi garam yang dapat di konsumsi oleh masyarakat secara langsung.

Pemberian bantuan peralatan dapat mempermudah para petani tambak garam dalam mengolah air laut karena media airlaut tidak langsung beralaskan tanah tetapi ada alas tarpal yang dapat membantu mengolah air laut menjadi butiran garam menjadi kristal putih yang secara langsung

dapat meningkatkan penghasilan para petani tambak garam.

Pada tahapan pembuatan garam masyarakat tambak garam tidak serta merta percaya dan yakin akan hasil garam, karena pekerjaan petani garam sebagian besar adalah pekerjaan yang di wariskan oleh nenek moyang untuk terus dilanjutkan agar dapat melangsungkan kehidupan.

Adapun kendala dalam pemberian bantuan peralatan bagi masyarakat yang berada di kawasan tambak garam yaitu ketersediaan dana dan anggaran yang tidak bisa tercukupi secara keseluruhan untuk masyarakat tambak garam di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Ketersediaan dana dan anggaran yang tidak tercukupi, menyebabkan sebagian masyarakat di kawasan tambak garam mengolah lahannya dengan cara tradisional sehingga berdampak pada pendapatan yang kurang optimal, dengan hasil garam yang ada di kelas paling rendah dalam penjualan.

Pengetahuan tentang pemasaran yang di berikanpun sudah melalui teknologi, dimana pemasaran dan promosi dilakukan di media sosial atau secara online. Hal ini memudahkan para petani tambak garam, yang dapat melakukan penjualan secara langsung kepada pabrik atau perusahaan yang membutuhkan garam secara langsung tanpa melalui perantara atau calo.

Ketiga, Pendampingan Secara berkelompok. Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan tahap Pendampingan melalui pembinaan terhadap masyarakat. Meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kemampuan masyarakat tambak garam khususnya yang memiliki tambak dan para pekerjanya.

Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep juga membantu dalam mempromosikan atau memperkenalkan hasil garam petani tambak di Kalianget dengan menampung aspirasi mereka memiliki hasil usaha garam yang nantinya akan di gabung pada program 1000 wirausaha muda. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan hasil produktivitas para pengusaha muda Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luar dan dapat menarik minat konsumen terhadap garam yang memiliki ke khasan dan cita rasa berbeda antara garam di kecamatan kalianget dan di daerah lainnya.

Keunikan garam khas Kecamatan Kalianget ini terdapat pada tingkat kadar keasinan yang terkandung dalam garam sehingga hasil produksi garam ini banyak di minati oleh pengusaha dari luar madura.

Adapun tujuan yang di ingin di capai dalam pendampingan ini, ialah, pertama Mengetahui kondisi perekonomian masyarakat Desa Kalianget Kabupaten Sumenep sejak adanya

Pemberdayaan berbasis masyarakat..
Kedua, Mengetahui penyebab kemerosotan perekonomian masyarakat tambak garam,
Ketiga menyusun strategi pemberdayaan dan pendekatan pendampingan, Keempat mampu membangkitkan kreatifitas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh selama berada di lapangan serta dari analisis data dari temuan-temuan yang ada yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil di jelaskan sebagai berikut ini:

- a. Peningkatan Kreativitas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep bertujuan meningkatkan hasil produksi serta peningkatan kualitas melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, pembinaan yang dilakukan berupa sosialisasi dengan penyuluhan materi dan teknik pengelolaan yang baik., akan tetapi masyarakat belum bisa menyerap materi yang diberikan karna keterbatasan daya pikir masyarakat yang masih tergolong primitif dan buta aksara.
- b. Tahap akses permodalan dan pemasaran dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dilaksanakan melalui pendaftaran diri langsung ke kantor Dinas Perikanan dan memberikan bukti-bukti usaha yang

dilakukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti kartu identitas diri, serta daftar kelompok petani berdasarkan kesepakatan yang telah di bentuk. Hal ini belum bisa dikatakan mudah, dikarenakan jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat masih jauh. sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat cukup mudah, serta dapat di akses oleh siapapun dan tidak ada kesan mempersulit masyarakat.

- c. Pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan yang dilaksanakan melalui sosialisasi yang berupa penyuluhan materi dan ditindaklanjuti dengan pelatihan cara mengolah yang baik dan membuat strategi pemasaran yang lebih praktis, namun pendampingan yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencapaian keberhasilan program pemberdayaan ekonomi diawali dengan sosialisasi program pada kelompok - kelompok terkait yang meliputi dinas teknis, masyarakat sasaran program/petani garam, para pengusaha pemilik tambak dan stakeholder lainnya guna mendapatkan respon dan masukan untuk menyempurnakan program yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan XXIX. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
- Nikijuluw, V.P.H. 2004. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta 2002.*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, cetakan XIX. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV. Bandung Penerbit Alfabeta
- Usman, Sunyoto. 2008 “ *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 *Tentang Perindustrian*